

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Beberapa hasil jurnal dan tesis serta pengambil kebijakan (*policy maker*) yang dianggap relevan dengan penelitian ini khususnya tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan.

Jurnal Kindervatter (1979) berjudul “Nonformal Education as An Empowering Process, Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts”. Pemberdayaan adalah “*people gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political forces in order to improve their standing in society*”.

Jurnal Engking H Soewarman (2012) berjudul “*Pendidikan Luar Sekolah Dan Pembangunan Manusia Indonesia*” pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya adalah pendekatan pendidikan yang membuat siswa memperoleh pemahaman yang lebih besar mengenai sosial, ekonomi serta politis, melalui (1) latihan terus menerus mengenai semua aspek yang berhubungan dengan proses belajar, (2) mempelajari keahlian yang responsif terhadap kebutuhannya, (3) bekerjasama secara kolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Apa yang dikatakan oleh pakar ini terfokus untuk memberi kekuatan pada yang lemah, agar supaya dia mempunyai kekuatan dan berdaya dalam menghadapi permasalahan yang sedang ia hadapi. Akan tetapi pakar ini memberikan solusi yang sangat baik dalam memberdayakan yang mempunyai kelemahan-kelemahan itu.

Jurnal Sudjana (2004) berjudul "*Pendidikan Nonformal, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Azas, Penerbit Falah Production, Bandung*". Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdayaan masyarakat seharusnya mempunyai program-program yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Antara program dan kebutuhan ada kesesuaian dengan perkembangan masyarakat saat ini. Sudjana mengatakan, "pengembangan sumberdaya manusia dimasa depan melalui pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, yaitu dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, kemudian meningkat ke masyarakat informasi". Sedangkan pendidikan menurut Smith (Sudjana, 2004: 398) dapat diartikan "sebagai upaya terorganisasi dan sistematis untuk mendorong belajar, menyiapkan kondisi-kondisi dan menyediakan kegiatan-kegiatan melalui kondisi dan kegiatan belajar dapat terjadi".

Jurnal yang dibuat oleh Tohani (2012) berjudul "*Pendidikan Non Formal dan Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan*" (studi kasus Kulon progo dan Gunung kidul). Kegiatan penelitian dilakukan guna menghasilakna keterangan atau informasi mengenai konseptual kecakapan hidup, praksis program kecakapan hidup, perumusan model pendidikan kecakapan hidup yang fesiabel/layak yaitu model pendidikan kecakapan hidup 4-H (head, hands, heart, dan health).

Dan karakteristik kebutuhan kecakapan hidup pada kelompok sasaran program pendidikan yang dianalisis yaitu KWD ternak kelinci dimana kecakapan khususnya kemampuan kreativitas dan mengelola (head), menjalin relasi (heart), bekerja profesional dan mampu memberi (hands) perlu dikembangkan dan kebutuhan pada kelompok KWK TKR dimana kemampuan mengelola (heads), bekerja dan memberi (hands) juga memerlukan suatu peningkatan. Mendasarkan pada temuan ini, model pendidikan kecakapan hidup yang terumuskan diaplikasikan pada kelompok sasaran tersebut. Berdasarkan pada hasil tahap pertama, kegiatan pengembangan model kecakapan hidup dilakukan.

Model pendidikan kecakapan hidup 4-H merupakan dari serangkaian kegiatan yang meliputi pelatihan vokasional, observasi lapangan, diskusi dan refleksi, pelatihan kecakapan hidup 4-H, serta penilaian dan penguatan. Model ini dikembangkan pada kedua kelompok sasaran dengan fokus pengembangan kecakapan hidup sebagaimana informasi yang diperoleh dari tahapan kebutuhan kecakapan hidup pada masing-masing kelompok.

Hasil evaluasi dari kegiatan pengembangan model PKH 4- H nampaknya mampu meningkatkan output pembelajaran dimana pada masing-masing kelompok terjadi peningkatan pemahaman/pengetahuan atau kecakapan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan pada temuan tersebut, penelitian dan pengembangan model PKH 4-H dipandang sebagai suatu upaya atau mekanisme yang efektif dan bermanfaat untuk pengembangan berbagai kecakapan-kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh individu atau masyarakat sehingga dirinya dapat mengatasi berbagai masalah hidup yang dihadapi terutama dapat melepaskan diri dari kondisi kemiskinan.

Model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberdayakan masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya insani.

Jurnal Tafrikhan (2009), Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsinya yang berjudul "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Oleh Kelompok Belajar Mandiri Desa (KBMD) Telernter E-Pabean (studi kasus di desa Pabean kecamatan Mungkid kabupaten Magelang)*". Skripsi ini membahas tentang proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan pinjaman modal untuk peningkatan produksi pertanian dengan tahap awal perencanaan, pelaksanaan, hingga sampai dengan masa panen.

Hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pinjaman pemodal pertanian yang dilakukan oleh Kelompok Belajar Mandiri dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan para petani di desa Pabean kecamatan Mungkid kabupaten Magelang.

Jurnal yang dibuat oleh Choili (2016) berjudul “*Konservasi Sumber Daya Alam dalam Islam sebagai wujud Pendidikan dan Akhlak manusia terhadap Lingkungan*” (studi kasus Kabupaten Mojokerto).

Upaya konservasi lingkungan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan secara signifikan dengan upaya-upaya pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan konsep konservasi dalam Islam yang diawali dengan menjaga keseimbangan jiwa, kestabilan atmosfer, menjaga kestabilan rantai dan jejaring makanan, menjaga siklus hidrologi, melakukan reboisasi dan menjaga kesuburan lahan, dan juga melindungi kawasan konservasi khusus.

Upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kesadaran dan mendukung upaya konservasi adalah dengan melahirkan kebijakan dari pemerintah tentang konservasi dengan menyeiringkan visi dan misi konservasi yang diharapkan akan mampu mengubah pola pikir masyarakat dengan mengintegrasikan melalui pendidikan formal maupun informal sehingga bisa membangun kesadaran mulai dini.

Tesis yang dilakukan Lestari (2009) berjudul “*Pengembangan desa wisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat*” (Studi kasus di Desa Kembang Arum, Sleman)”. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, maju, dan mandiri. Pemerintah berusaha mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri. Program PNPM mandiri ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait dengan peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Salah satu sektor yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui sektor pariwisata. Program pengembangan pariwisata akan disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu sektor yang diunggulkan di Indonesia adalah sektor pariwisata.

Dengan dikembangkannya sektor pariwisata maka akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata adalah Yogyakarta.

Yogyakarta memiliki banyak tujuan wisata, masyarakatnya pun masih menjunjung tinggi sikap ramah tamah dan sopan santun terhadap orang lain. Jenis wisata konvensional sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai merindukan suatu wisata yang sisinya tidak hanya bersenang-senang saja tapi juga ada unsur pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, di Yogyakarta mulai berkembang wisata minat khusus, yaitu desa wisata. Desa wisata ini berbeda dengan jenis wisata pada umumnya.

Wisatawan yang berkunjung ke desa wisata ini tidak hanya sekedar bersenang-senang saja, namun juga bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat yang tinggal di desa wisata tersebut. Desa wisata ini menawarkan keindahan alam, budaya lokal yang khas, dan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Perkembangan desa wisata semakin menunjukkan kemajuan, hal ini dibuktikan dengan mulai banyaknya muncul desa wisata di Yogyakarta yang menyajikan keunikan yang berbeda-beda. Selain itu jumlah wisatawan yang mengunjungi desa wisata semakin banyak.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata khususnya desa wisata ini bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat. Dalam pengembangan desa wisata ini sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat. Mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Pengelolaan desa wisata ini juga sepenuhnya dipegang oleh masyarakat. Masyarakat dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain, dan dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memberikan penghasilan pendapatan tersendiri bagi masyarakat.

Salah satu desa wisata yang potensial di Sleman adalah wisata Kembang Arum yang terletak di Donokerto Turi Sleman. Desa wisata ini memiliki banyak potensi wisata yang dimiliki, seperti keindahan alam, sumber daya manusia, transportasi, dan akomodasi.

Di desa wisata Kembang Arum ini juga sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan wisata yang berlangsung di desa mereka.

Bentuk pemberdayaan masyarakat Kembang Arum melalui pengembangan desa wisata adalah partisipasi masyarakat serta adanya sistem bagi hasil bagi masyarakat jika ada wisatawan yang berkunjung. Sistem bagi hasil ini ditentukan melalui kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Walaupun bukan sebagai pendapatan utama namun hasil pendapatan dari desa wisata ini akan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam keterangan di atas jelaslah sudah bahwa pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui pengembangan desa wisata. Diharapkan dengan adanya pengembangan desa wisata yang dilakukan secara terus menerus akan menciptakan suatu masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera (Lestari, 2009).

Tesis yang dilakukan oleh Wulandari (2004) tentang "*Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah* (studi kasus Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)". Pemberdayaan masyarakat desa melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah di Desa Kajongan sudah terlaksana dengan baik, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan ini, dilakukan melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama yaitu perencanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan dengan melihat potensi alam sebagai penyedia bahan baku industri serta melihat kondisi masyarakat yang jauh dari sejahtera dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Selanjutnya, menentukan latar belakang berdirinya pelatihan.

Menentukan struktur kepengurusan dan rekrutmen masyarakat sebagai warga belajar melalui proses musyawarah dan diskusi di balai desa oleh pengelola dan tokoh masyarakat.

Pengawasan atau pendampingan dilakukan pada proses pelaksanaan dengan cara memberikan contoh praktek langsung cara pembuatan sapu gelagah dan memantau jalannya produksi, evaluasi dilakukan dengan menargetkan jumlah produksi karena berpengaruh terhadap penghasilan warga belajar dan kualitas pelatihan pembuatan sapu gelagah, sedangkan tindak lanjut yang dilakukan dengan cara memantau dan mengembangkan ketrampilan lainnya serta diharapkan masyarakat bisa membuka wirausaha mandiri.

Faktor pendorong dari pelaksanaan pelatihan pembuatan sapu gelagah adalah Respon positif dari masyarakat yang antusias. Ini terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan pelatihan pembuatan sapu gelagah, proses pembuatan Sapu yang tergolong mudah sehingga mudah diterima oleh masyarakat, selain itu kerjasama dalam pemasaran juga menjadi pendorong proses pelaksanaan produksi. Selanjutnya, dukungan pemerintah dan mitra lain, pemerintah dan mitra lain yang bekerjasama ikut mendukung diadakannya pelatihan pembuatan Sapu Gelagah.

Ini terbukti dengan adanya bantuan promosi atau pemasaran dan bantuan berupa alat-alat produksi. Dan terakhir potensi alam yang memadai, tersedianya sumber bahan baku yang mudah diperoleh di sekitar wilayah Desa Kajongan ikut serta membantu mendapatkan bahan baku produksi dengan mudah, sehingga untuk masalah bahan baku tidak perlu diragukan.

Adapun faktor penghambat pelatihan pembuatan sapu gelagah adalah kurang optimalnya pemerintah dalam penyuluhan penggunaan peralatan produksi yang diberikan kepada pemilik industri serta kurangnya bantuan berupa permodalan. Selanjutnya, kurangnya fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam kegiatan pembuatan sapu gelagah.

Kemudian perubahan cuaca akan sangat berpengaruh terhadap proses produksi, mengingat proses produksi sangat bergantung pada sinar matahari untuk menjemur bahan baku, akan menghambat jalannya proses produksi, masyarakat merasa kesulitan dalam menangani perubahan yang tidak menentu, menghambat jalannya proses produksi sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam menangani perubahan cuaca yang tidak menentu (Wulandari, 2014).

Jurnal yang dibuat oleh Purba (2008) tentang “*Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun)” pelaksanaan suatu program pembangunan yang dialokasikan ke negeri-negeri di kecamatan panombeian panei sejak dari perencanaan yang terbuka dan melibatkan masyarakat telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang bernilai paling besar bagi masyarakat dan hasilnya pun efektif.

Manfaat bagi masyarakat yang bernilai paling besar adalah adanya pemahaman tentang keterlibatan masyarakat tersebut sebagai suatu solusi dari apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi masalah masyarakat. Dengan terbentuknya pemahaman tersebut, sudah merupakan salah satu proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian menjadi cerminan karakteristik perencanaan yang melibatkan masyarakat sebagai *user*, sekaligus sebagai salah satu aktor utama.

Pada sisi lain, program apapun namanya asal bertujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat lokal haruslah membuka peluang yang lebar bagi masyarakat untuk turut terlibat secara langsung sejak perencanaan sampai tahap pengawasan karena berkontribusi dalam menentukan kelanjutannya. Sangat prematur membicarakan pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat negeri, apabila tidak terlebih dahulu mengkaji sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat terimplementasi dalam proses pembangunan.

Keterlibatan masyarakat meskipun kecil kapasitasnya, akan tetapi sangat menentukan keberhasilannya dalam proses pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa keterlibatan masyarakat signifikan kaitannya dengan proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan terlihat bahwa masyarakat di lokasi penelitian sebenarnya memiliki antusias dan respon yang tinggi dalam proses pembangunan yang memang berkenaan langsung dengan kebutuhan pokoknya, keterlibatan dalam proses perencanaan sudah dianggap baik yang terlihat dari tingginya tingkat antusias masyarakat. Aspek yang terlibat dalam proses perencanaan adalah aspek sosial politik.



Ketika aspek sosial telah terlaksana maka dengan sendirinya aspek politik juga akan berjalan. Pelaksanaan musyawarah dalam perencanaan program BPN/K memberikan kewenangan masyarakat untuk menentukan rumusan keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan dan dilaksanakan di negeri mereka. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan masyarakat kurang terlibat karena sikap masyarakat yang susah diajak bergotong royong dikarenakan harus mencari nafkah sehingga harus melibatkan pihak ketiga.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kabupaten, Kecamatan, Nagori dan Masyarakat dalam hal ini Maujana Nagori telah memberikan manfaat yang berarti bukan hanya sebagai pengawas semata tetapi juga bermanfaat sebagai bahan masukan evaluasi dalam pembangunan kedepannya. (Purba, 2008).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dosen Jurusan PLS FIP UNY yaitu Hiryanto, M. Si (2008) tentang “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Non Formal (Studi Kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul)*” Pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan dan merupakan hakekat pendidikan itu sendiri, karena apa yang disebut dengan pendidikan termasuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal adalah usaha memberdayakan manusia, memampukan manusia, mengembangkan talenta yang ada pada diri manusia agar dengan kemampuan/potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan melalui pendidikan/pembelajaran.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaannya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat (Hiryanto, 2008).

**Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Kindervatter (1979)	“Nonformal Education as An Empowering Process, Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts”.	Pemberdayaan adalah “people gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political forces in order to improve their standing in society”.
2.	Engking H Soewarman (2012)	“Pendidikan Luar Sekolah Dan Pembangunan Manusia Indonesia”	Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya adalah pendekatan pendidikan yang membuat siswa memperoleh pemahaman yang lebih besar mengenai sosial, ekonomi serta politis, melalui (1) latihan terus menerus mengenai semua aspek yang berhubungan dengan proses belajar, (2) mempelajari keahlian yang responsif terhadap kebutuhannya, (3) bekerjasama secara kolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang

3.	Sudjana (2004)	“Pendidikan Nonformal, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Azas, Penerbit Falah Production, Bandung”.	timbul Pendidikan luar sekolah sebagai pemberdayaan masyarakat seharusnya mempunyai program-program yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat.
4.	Entoh Tohani (2012)	NonFormal dan Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan” studi kasus Kulon progo dan Gunung kidul	Model pendidikan kecakapan hidup 4-H merupakan dari serangkai kegiatan yang meliputi pelatihan vokasional, observasi lapangan, diskusi dan refleksi, pelatihan kecakapan hidup 4-H, serta penilaian dan penguatan. Model ini dikembangkan pada kedua kelompok sasaran dengan fokus pengembang Entoh Tohani an kecakapan hidup sebagaimana informasi yang diperoleh dari tahapan kebutuhan kecakapan hidup
5.	Tafrikhan (2009)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Oleh Kelompok	pada masingmasing kelompok. proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

		<p>Belajar Mandiri Desa (KBMD) Telernter E-Pabean (studi kasus di desa Pabean kecamatan Mungkid kabupaten Magelang</p>	<p>pendampingan dan pinjaman modal untuk peningkatan produksi pertanian dengan tahap awal perencanaan, pelaksanaan, hingga sampai dengan masa panen.14 Hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pinjaman pemodalan pertanian yang dilakukan oleh Kelompok Belajar Mandiri dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan para petani di desa Pabean kecamatan Mungkid kabupaten Magelang.</p>
6.	<p>Muhammad Sirojuddin Choili (2016)</p>	<p>Konservasi Sumber Daya Alam dalam Islam sebagai wujud Pendidikan dan Akhlak manusia terhadap Lingkungan” studi kasus Kabupaten Mojokerto.</p>	<p>Upaya konservasi lingkungan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan secara signifikan dengan upaya-upaya pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan konsep konservasi dalam Islam yang diawali dengan menjaga keseimbangan jiwa, kestabilan atmosfer, menjaga kestabilan rantai dan jejaring makanan, menjaga siklus hidrologi, melakukan</p>

7.	Suci Lestari (2009)	Pengembangan desa wisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Desa Kembang Arum, Sleman)	<p>reboisasi dan menjaga kesuburan lahan, dan juga melindungi kawasan konservasi khusus.</p> <p>Salah satu sektor yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui sektor pariwisata. Program pengembangan pariwisata akan disenirgakan dengan program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu sektor yang diunggulkan di Indonesia adalah pariwisata. Dengan dikembangkannya sektor pariwisata maka akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Salah satu provinsi yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata adalah Yogyakarta. Yogyakarta memiliki banyak tujuan wisata, masyarakatnya pun masih menjunjung tinggi sikap ramah tamah dan sopan santun terhadap orang lain.</p>
8.	Justina nuriati	Pemberdayaan	Keterlibatan masyarakat

	<p>purba (2008)</p>	<p>masyarakat desa di kecamatan panombeian panei kabupaten simalungun</p>	<p>meskipun kecil kapasitasnya, akan tetapi sangat menentukan keberhasilannya dalam proses pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa keterlibatan masyarakat signifikan kaitannya dengan proses pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian dan pengamatan terlihat bahwa masyarakat di lokasi penelitian sebenarnya memiliki antusias dan respon yang tinggi dalam proses pembangunan yang memang berkenaan langsung dengan kebutuhan pokoknya, keterlibatan dalam proses perencanaan sudah dianggap baik yang terlihat dari tingginya tingkat antusias masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten, kecamatan serta Masyarakat nagori dalam hal ini Maujana Nagori telah memberikan manfaat yang berarti bukan hanya sebagai pengawas semata tetapi juga</p>
--	---------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			bermanfaat sebagai pengawas semata tetapi juga bermanfaat sebagai bahan masukan evaluasi dalam pembangunan kedepannya.
9	Ayu Purnami Wulandari (2008)	Pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelatihan pembuatan sapu gelagah di desa kajongan kecamatan bojongsari, purbalingga.	Pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan pembuatan sapu gelagah di desa kajongan sudah terlaksana dengan baik, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan ini, dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu perencanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan dengan melihat potensi alam sebagai penyedia bahan baku industri serta melihat kondisi masyarakat yang jah dari sejahtera dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Selanjutnya, menentukan latar belakang berdirinya pelatihan. Menentukan struktur kepengurusan dan rekrutment masyarakat sebagai warga belajar melalui proses musyawarah

			dan diskusi di balai desa oleh pengelola dan tokoh masyarakat.
10	Hari Rujito (2015)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Model Desa Konservasi dan Ekowisata di Kawasan Taman Nasional Merubetiri” di Taman Nasional Meru Betiri, Jember.	Berdasarkan hasil pengembangan model penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa aspek terpenting pemberdayaan masyarakat kawasan TNMB maka urutannya adalah sebagai berikut (i) penguatan kelembagaan masyarakat (24%), (ii) pelibatan masyarakat ke dalam rehabilitasi kawasan (21%), (iii) pengembangan usaha milik masyarakat (20%), (iv) kekuatan program pendampingan (20%), (v) peningkatan kapasitas masyarakat (19%). Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNMB untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan telah berjalan dengan baik (dengaan rata-rata nilai 3,46



			dengan skala 1-5) , sedangkan di wilayah Jember pencapaiannya sedang- sedang saja (dengan rata-rata nilai 3,12).
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Kumpulan tesis dan jurnal

## B. Landasan Teori

### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat yang bermula dari tidak mampu dan selanjutnya menjadi mampu serta untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan (Sutaryono, 2008).

Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat Dalam pendapat Sulistyani (2007, h.83) mengemukakan bahwa tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui adalah:

- a. Tahap pembentukan dan penyadaran perilaku
- b. Tahap memberikan ketrampilan dasar dan transformasi kemampuan berupa wawasan
- c. Tahap ketrampilan, kecakapan, dan intelektual sehingga tercipta kemampuan inovatif dan inisiatif.

Teknik Pemberdayaan masyarakat Dubois dan Miley dalam Suharto (2006, h.68) memberikan cara yang efektif dalam proses pemberdayaan yaitu:

- a. Menghargai pilihan klien dan hak klien dalam menentukan nasibnya sendiri serta membangun relasi yang merefleksikan respon empati
- b. Membangun komunikasi untuk menghormati klien, berfokus pada klien, menghargai dan menjaga rahasia klien
- c. Terlibat dalam memecahkan masalah yang bertujuan untuk memperkuat posisi klien serta menghargai hak-hak klien
- d. Merefleksikan nilai profesi, sikap serta ketaatan terhadap kode etik profesi

Sedangkan pihak-pihak yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat Merujuk pada pendapat Yansen (2013,h.175) yang terlibat dalam proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peranan pemerintah atau birokrasi pemerintah
- b. Organisasi-organisasi masyarakat di luar lingkungan masyarakat itu sendiri
- c. Lembaga masyarakat
- d. Koperasi
- e. Pendamping

## **2. Pendidikan Non Formal Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa Sesuai Perspektif Ekonomi Islam**

Pendidikan non formal sebagai pemberdaya masyarakat seharusnya mempunyai program-program yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. Antara program dan kebutuhan ada kesesuaian dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Sudjana (2004) mengatakan “Pengembangan sumberdaya manusia dimasa depan melalui pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, yaitu dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, kemudian meningkat ke masyarakat informasi”. Sedangkan pendidikan menurut Smith (Sudjana, 2004: 398) dapat diartikan “sebagai upaya terorganisasi dan sistematis untuk mendorong belajar, menyiapkan kondisi-kondisi dan menyediakan kegiatan-kegiatan melalui kondisi dan kegiatan belajar dapat terjadi”. Pendidikan hendaknya diatur di sekitar empat jenis belajar yang fundamental sifatnya yang sepanjang hayat kehidupan seseorang dapat dikatakan sendi atau sokoguru pengetahuan.

Hubungan pendidikan non formal dan pemberdayaan dalam hal ini adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab yang akan datang, dengan memaknai belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar hidup bersama (*learning to live together*), dan belajar menjadi seseorang (*learning to be*) secara bersamaan dan berkesinambungan.

Pendidikan non formal adalah suatu institusi pendidikan yang bergerak dan bekerja di luar sistem persekolahan formal dalam masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan terjadi melalui beberapa tahapan menurut Kindervatter (terjemahan Soewarman, 2000), yaitu pertama masyarakat dapat mengembangkan pemikirannya bahwa mereka dapat melakukan sesuatu untuk meningkatkan kehidupannya serta memperoleh keahlian untuk merealisasikannya. Selanjutnya mereka akan memperoleh pengalaman yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dan pada akhirnya, kemampuan serta rasa percaya diri akan terus berkembang, mereka akan bekerja sama untuk meningkatkan dasar dan sumber kehidupan yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Meskipun pendidikan formal merupakan komponen penting dalam pendidikan sepanjang hayat. Akan tetapi, peran pendidikan nonformal dan informal dalam rangka pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat sangat dibutuhkan saat ini dan kedepan.

Pendidikan nonformal menjadi bagian dari pembicaraan internasional terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan tentang pendidikan pada era sebelum tahun 1960 dan akhir tahun 1970-an. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana kaitan antara konsep pendidikan berkelanjutan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat.

Begitu pula dengan yang diungkapkan Fordham (1993), menyatakan bahwa sejak tahun 1970-an, ada empat karakteristik dasar yang berkaitan dengan peran pendidikan nonformal di masyarakat:

- a. Relevan dengan kebutuhan kelompok masyarakat (orang-orang) yang tidak beruntung.
- b. Ditujukan dan memiliki perhatian khusus pada kategori sasaran-sasaran tertentu.
- c. Terfokus pada program yang sesuai dengan kebutuhan,
- d. Fleksibel dalam pengorganisasian dan dalam metoda pembelajaran.

Untuk itulah studi yang lebih mendalam tentang keberadaan pendidikan nonformal harus terus dilakukan, baik melalui; penelitian, telaah buku, temu konsultasi dengan negara-negara maju, seminar nasional dan internasional serta studi banding terhadap negara-negara yang telah berhasil dalam mengembangkan pendidikan nonformal.

Program pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (H.A.R, 2000).

Ada tujuan-tujuan pendidikan non formal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar (basic education) semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup.

Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan non formal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup.

Contoh program pendidikan non formal yang ditujukan untuk mendapatkan dan memaknai nilai-nilai hidup misalnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, “manajemen kolbu”, latihan pencarian makna hidup, kelompok hoby, pendidikan kesenian, dan sebagainya. Dengan program pendidikan ini hidup manusia berusaha diisi dengan nilai-nilai keagamaan, keindahan, etika dan makna.

pendidikan non formal memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
- b. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya.
- c. Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
- d. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik.
- e. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
- f. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab., peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.
- g. Penggunaan sumber-sumber local. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber local digunakan seoptimal mungkin.

Proses kependidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Proses tersebut senantiasa dalam nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang melahirkan norma-norma syariah dan akhlak al-karimah.

Tujuan Pendidikan dalam perspektif ekonomi Islam tidak lain adalah merealisasikan idealitas Islami. Sedangkan idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuatan mutlak yang harus ditaati. Adapun dimensi kehidupan yang mengandung nilai ideal Islami dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, antara lain:

- a. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia. Dimensi nilai kehidupan ini mendorong kegiatan manusia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia ini agar menjadi kekal/sarana bagi kehidupan di akhirat.
- b. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan. Dimensi ini menuntut manusia untuk tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki ( Najahah,2007).

### **3. Konsep Pengembangan Desa Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa Sesuai Perspektif Ekonomi Islam**

#### **a. Konsep Pengembangan Desa**

Hal-hal yang dapat dicapai dalam proses partisipasi dan terbentuknya pengembangan desa adalah meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*) komunitas lokal melalui proses belajar pengalaman (*experience based learning process*) dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek dari proses pemberdayaan. (Mahardika, 2001, hal. 25).

Untuk itu langkah dan peranan pemerintah maupun NGO (*non goverment organization*) dalam pendekatan terbentuknya desa wisata menyangkut tiga hal :

- 1) Penayadaran (*concientization*), yaitu sebuah proses membangun pemahaman yang ditujukan untuk mempengaruhi kesadaran dan perilaku dalam bentuk rencana aksi dan implementasinya, sehingga masyarakat Desa Wisata Bejiharjo paham akan potensi yang mereka miliki untuk membangun desa wisata yang dikelola masyarakat setempat.
- 2) Pengorganisasian Masyarakat (*community organizing*), yaitu upaya pemberdayaan masyarakat agar memahami dan sadar terhadap kerentanan dan kapasitasnya maupun kondisi lingkungannya serta memobilisasi masyarakat dalam merespon permasalahan maupun memenuhi kebutuhannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sehingga, peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat utama penting untuk keberlangsungannya.
- 3) Penghantaran Sumber Daya Manusia (*resources delivery*), yaitu memberikan pengertian serta arahan kepada masyarakat akan keberadaan potensi yang bisa dimanfaatkan sehingga mampu mengelola sumber daya alam maupun manusia. (Mahardika, 2001).

#### **b. Tinjauan tentang Pengembangan Desa**

Pengembangan desa pada dasarnya adalah proses bagaimana sebuah desa dapat berkembang dan sebagai pusat yang memiliki unsur ekonomi dan pendidikan. Pembangunan sektor desa sangat potensial sekali untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya.

Pendekatan perencanaan pengembangan desa yang bisa dilakukan adalah *community based development*. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, mengelola sumber daya yang tersedia. Sehingga, masyarakat dapat menerima manfaat ekonomi secara langsung dan mencegah arus urbanisasi (Marpung, 2000, hal. 49).

Dalam Al-Quran surah an-Nahl ayat 10-11 di jelaskan bahwasannya :

وَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ  
 (١٠) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١)

*“Dia-lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang (pada tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. (QS. 16:10) Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. 16:11)” (QS. An-Nahl: 10-11).*

Maksud dari ayat tersebut Ketika Allah telah menyebutkan apa yang telah Dia berikan nikmat kepada mereka, yaitu berupa binatang-binatang ternak, dan binatang-binatang melata, mulailah Dia menyebutkan nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka yaitu berupa turunnya hujan dari langit, yang di dalam hujan itu ada air minum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan binatang-binatang mereka.

Dan juga sebagaimana Allah berfirman yang artinya: “Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).” (an-Naml: 60).



Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Allah telah mengatur segala nikmat seluruh umat manusia. Jadi seharusnya masyarakat khususnya di Desa tak perlu khawatir akan kesejahteraan hidupnya karena di desa sendiri terdapat banyak potensi yang apabila mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan dukungan berbagai kalangan akan bermanfaat dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat desa.

#### **4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Perspektif Ekonomi Islam**

Konsep Pemberdayaan dalam Islam Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau kekuatan.

Teori-teori pemberdayaan secara tegas memusatkan pada hambatan-hambatan struktural yang menghalangi orang untuk menjangkau sumber-sumber yang perlu untuk kesehatan dan kesejahteraan. Carlzon dan Macauley mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut: membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan (Anshar, 2017).

Konsep pemberdayaan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dari Anas bin Malik ra, ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW dari kalangan Anshar untuk meminta pekerjaan. Meskipun sangat mungkin bagi Rasulullah SAW merekomendasikan kepada sahabat-sahabatnya yang kaya untuk merekrutnya menjadi pegawai, namun saat itu Nabi memilih tidak melakukannya.

Justru beliau meminta kepada orang tersebut memberikan sesuatu yang ada di rumahnya kepada Nabi untuk dilelang, setelah mendapatkan uang dari lelang barang tersebut, lantas Nabi memberikan uangnya kepada si peminta pekerjaan tadi sambil memberikan uang hasil lelang.

Nabi berpesan kepada lelaki agar segera membelikan 29 makanan untuk keluarganya yang satu dirham dan yang satu dirham dibelikan kampak untuk diberikan kembali kepada Nabi dan kemudian segera menyerahkan kampak kepada Rasulullah SAW (Anshar, 2017).

Setelah sebuah kampak tersebut beliau terima, kemudian dibuatkan gagang untuk pegangan yang kemudian diberikan kembali kepada si lelaki. Beliau menyuruh lelaki tersebut untuk mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar dan melarang lelaki tersebut menemuinya sebelum waktu lima belas hari, setelah lewat lima belas hari, lelaki tersebut mendatangi Rasulullah SAW dengan senang. Dari bekerja menjual kayu tersebut lelaki itu bisa mendapatkan sepuluh dirham dan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Nabi pun turut senang mendengar hal itu, kemudian beliau bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah Ra.: "Ini lebih baik bagimu dari pada memintaminta, itu akan mencoreng wajahmu kelak pada hari kiamat. Dan meminta-minta dibenarkan kecuali pada tiga golongan. Pertama, orang yang benar-benar miskin. Kedua, Orang yang terlilit utang. Ketiga, orang yang dibebani tebusan besar." Peremberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Q.S ali-Imrân/3:159, "maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S. Ali-Imrân/3: 159). Dalam Q.S. al-Mâi'dah/5: 2).

Allah SWT juga berfirman, "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Q.S. al-Mâi'dah/5:2).

Berdasarkan ayat di atas bahwa manusia sebagai bagian masyarakat harus tolong menolong dalam kebaikan dalam pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Istiqomah (2008, h.67-68) dalam jurnalnya Pengembangan Masyarakat Islam menjelaskan adanya lima dalam memberdayakan umat antara lain :

- a. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.
- b. Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki.
- b. Pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.
- c. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran tetapi kontribusi tahapan yang mesti dilalui oleh suatu dalam program kerja pemberdayaan masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Kelima prinsip turunan tersebut sebenarnya cerminan aktualisasi nilai Islam dalam memberikan pandangan hidup sehingga menunu tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Kunci keberhasilan tersebut yakni penyatuan antara dimensi material dan spritual dalam kehidupan sosial.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
- c. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi jalan, listrik, jembatan maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan. Dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya sangat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini (Edi, 2009, hal. 102).

Pembahasan perekonomian umat, ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. Pertama, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk.

Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang dapat berfikir jernih dan logis, bahwa Islam merupakan sistem hidup. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam yang terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia.

Secara garis besar aturan-aturan tersebut dibagi dalam tiga bagian, yaitu : aqidah, akhlak dan syari'ah yang terdiri atas bidang muamalah (sosial), dan bidang ibadah (ritual). (*Abdullah Abdul At-Tariqi : 2004*).

Prinsip pokok ekonomi Islam terbagi atas lima hal penting, yaitu :

a. Kewajiban berusaha

Islam tidak mengizinkan umatnya menjauhkan diri dari pencaharian kehidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit yang menggantungkan hidup kepada orang lain, untuk itu wajib berusaha dan merubah nasib sendiri.

b. Membasmi pengangguran

Kewajiban setiap individu adalah bekerja, sedangkan negara diwajibkan menjalankan usaha membasmi pengangguran. Tidak boleh ada pengangguran.

c. Mengakui hak milik

Berbeda dengan paham komunis, Islam senantiasa mengakui hak milik perseorangan berdasarkan pada tenaga dan pekerjaan, baik dari hasil sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan. Selain dari keduanya tidak boleh diambil dari hak miliknya kecuali atas keridhaan pemiliknya sendiri.

d. Kesejahteraan agama dan sosial

Menundukkan ekonomi dibawah hukum kepentingan masyarakat merupakan suatu prinsip yang sangat penting masa kini. Prinsip ini ditengok oleh Islam dengan suatu instruksi dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala Negara Islam. Yang diantaranya adalah kewajiban untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin.

e. Beriman kepada Allah SWT

Pokok pendirian terakhir ialah soal ketuhanan. Mengimankan ketuhanan dalam ekonomi berarti kemakmuran yang diwujudkan tidak boleh dilepaskan dari keyakinan ketuhanan. Sewajarnya urusan ekonomi jangan melalaikan kewajiban kepada Allah SWT, harus menimbulkan cinta kepada Allah SWT, menafkahkan harta untuk meninggikan syi'ar Islam dan mengorbankan harta untuk berjihad dijalan Allah SWT. (*Abdullah Abdul At-Tariqi : 2004*)

Islam merupakan agama yang sempurna yang ajarannya mencakup serta mengurus berbagai persoalan kehidupan manusia, baik yang dibahas secara rinci maupun secara umum. Secara esensial ajaran Islam yang diturunkan Allah swt. kepada Rasulullah saw. Secara umum terbagi kepada tiga ranah, yakni akidah, syariah dan akhlaq yang masing-masing ranah mempunyai peranan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Ajaran Islam mengatur perilaku manusia, baik kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term fiqih atau ushul fiqih disebut dengan syariah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syariah ini terbagi kepada dua, yakni ibadah (*Hablumminallah*) dan muamalah (*Hablumminannas*).

Sesuai dengan klasifikasi di atas, kegiatan ekonomi (mu'amalah) sebagai salah satu bentuk implementasi dari hubungan antar sesama manusia (*Hablumminannas*), merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akidah, ibadah dan akhlak.

Dengan kata lain, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek akidah, ibadah, maupun akhlak, hal ini didasarkan pada tinjauan dari perspektif Islam, dimana perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak.

Dalam perkembangan dewasa ini, secara umum ada dua sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia, yaitu sistem ekonomi *Kapitalis* dan sistem ekonomi *Sosialis*. Sistem ekonomi yang disebutkan pertama yaitu *Kapitalis* yang merupakan suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta. Sedangkan sebaliknya yaitu sistem ekonomi *Sosialis* di mana pemerintah atau pekerja memiliki serta menjalankan semua alat produksi, dengan demikian, usaha swasta dibatasi dan mungkin kadang-kadang dikontrol atau bahkan dihapuskan sama sekali.

Disisi lain berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, Islam menerapkan sistem ekonominya dengan berlandaskan pada moral dan hukum bersama untuk menegakkan suatu sistem yang praktis dan idealis. Ditilik dari segi prioritas, Islam lebih mengedepankan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber kepada Alquran dan sunnah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *ekonomi menurut Islam* merupakan sekumpulan dasar-dasar (asas) umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-quran dan As-Sunnah, dan setiap sistem yang didirikan di atas landasan-landasan tersebut diharapkan dapat relevan dengan perkembangan lingkungan dan masa. Sehubungan dengan hal tersebut, Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam memegang peranan penting dalam memberikan dasar-dasar pada sistem perekonomian menurut Islam.

Selain itu, *ekonomi menurut Islam* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi secara umum (konvensional). Di antara ciri-ciri tersebut yaitu, bahwa ekonomi merupakan bagian dari sistem Islam secara integral, dan ekonomi menurut Islam bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam upaya menyempurnakan pengakuan Islam terhadap kebebasan ekonomi, Islam telah memberikan wewenang kepada negara untuk ikut campur dalam fungsionalisasi sistem ekonomi Islam.

Berdasar pada uraian di atas dapat dipahami bahwa perwujudan dari pengakuan Islam akan kebebasan ekonomi dengan menentukan ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bertujuan untuk merealisasikan dua hal secara umum yaitu: *pertama*, agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam.

*Kedua*, demi terjaminnya hak negara (otoritas) dalam ikut campur baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu, maupun untuk mengatur (mengintervensi) atau melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu atau tidak mampu dijalankan dengan baik.

Uraian tersebut menjelaskan kepada kita bahwa persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah ekonomi telah diatur dalam Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa aturan Islam tentang ekonomi termasuk aturan yang sempurna dan lengkap. Oleh karena itu, pengaplikasian sistem ekonomi Islam dalam tatanan perekonomian umat kemungkinan besar akan lebih membawa kepada kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.

Pengembangan ekonomi dalam Islam mengindikasikan bahwa perhatian Islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah dan yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan.



Agar pengembangan ekonomi dapat merealisasikan tujuan syariah, maka seidealnya jika dia memiliki beberapa kriteria, yang terpenting diantara kriteria-kriteria merupakan sebagai berikut:

- a. Pengembangan ekonomi dalam ekonomi Islam tidak akan dapat merealisasikan tujuannya jika tidak dijalankan secara komprehensif.
- b. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan umat merupakan tuntutan dalam syariah.
- c. Idealnya, pengembangan ekonomi dalam Islam mencakup semua lapisan masyarakat.
- d. Pengembangan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan syariah dan ibadah yang mendekati seorang muslim kepada Allah jika dilakukannya dengan ikhlas karena-Nya.
- e. Sesungguhnya sistem ekonomi yang mengedepankan keuntungan (*income*) tidak dibenarkan jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.
- f. Sesungguhnya berbagai upaya pengembangan ekonomi pada masa Umar *Radiyahallahu Anhu* terfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat.

Bentuk- bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Menurut Ndraha (2003) diantaranya :

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bergaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. *Bergaining* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.

Utomo menyatakan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas kehidupan kerja (*quality of work*) yang tinggi dan berorientasi kepada ;

- 1) partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*)
- 2) program pengembangan karir (*career development program*),
- 3) gaya kepemimpinan (*leadership style*),
- 4) derajat tekanan yang dialami oleh karyawan (*the degrees of stress experienced by employees*)
- 5) budaya organisasi (*the culture of the organization*).

- b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan. (Ndaraha, 2003).